

**PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2026**



**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari upaya perencanaan tahunan perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2026. Dokumen ini juga mencerminkan komitmen Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemenuhan hak-hak kelompok rentan dan marginal di Kota Probolinggo.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, data, maupun dukungan teknis. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dan akuntabel dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan.

Probolinggo, Agustus 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN TAHUN 2023	 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	90
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	 93
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	93
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	102
3.3 Program dan Kegiatan	104
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	 132
 BAB V PENUTUP	 137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan terpadu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini memuat prioritas program dan kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap (Perangkat Daerah) PD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan pasal 13, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Fungsi Renja sesuai dengan pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi “Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

a. Tahap persiapan penyusunan

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

b. Tahap penyusunan rancangan

Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Tahap penetapan renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

a. Renja SKPD merupakan muatan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

- setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026;
 - c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Probolinggo sebagai salah satu perangkat daerah yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kondisi sosial masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan ramah anak. Dalam perjalanannya, isu-isu sosial yang ditangani oleh Dinsos P3A semakin kompleks, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak, maraknya eksploitasi ekonomi terhadap anak, serta masih lemahnya partisipasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak, diwujudkan dalam kebijakan dan program-program strategis yang harus dirancang secara matang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Renja Tahun 2026 menjadi sangat penting untuk mengonsolidasikan berbagai agenda pembangunan sosial yang telah dirumuskan dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025–2029**.

Penyusunan Renja Dinsos P3A Tahun 2026 juga dilakukan dengan mempertimbangkan **hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**, integrasi

program prioritas nasional dan provinsi, serta hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjawab isu-isu strategis yang berkembang.

Lebih jauh, perencanaan ini juga diarahkan untuk mendukung **pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs)** yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P3A, seperti pengentasan kemiskinan (Goal 1), kesetaraan gender (Goal 5), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8), serta pengurangan kesenjangan (Goal 10).

Dengan memperhatikan dinamika permasalahan sosial, arah kebijakan pembangunan, landasan hukum yang berlaku, serta potensi dan kapasitas daerah, maka penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam penguatan kinerja perangkat daerah untuk mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dan mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Probolinggo yang tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan, tetapi juga sebagai pijakan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan sosial di tahun-tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026 ini disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, RENJA ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender;
 17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
 19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

1.3. MAKSUD TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai dasar dalam penentuan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD;
- b) Menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 ke dalam rencana kerja tahunan;
- c) Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026;
- c) Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan terpadu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini memuat prioritas program dan kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap (Perangkat Daerah) PD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan pasal 13, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Fungsi Renja sesuai dengan pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi “Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

a. Tahap persiapan penyusunan

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

b. Tahap penyusunan rancangan

Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Tahap penetapan renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

a. Renja SKPD merupakan muatan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

- setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026;
 - c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Probolinggo sebagai salah satu perangkat daerah yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kondisi sosial masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan ramah anak. Dalam perjalanannya, isu-isu sosial yang ditangani oleh Dinsos P3A semakin kompleks, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak, maraknya eksploitasi ekonomi terhadap anak, serta masih lemahnya partisipasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan dan anak, diwujudkan dalam kebijakan dan program-program strategis yang harus dirancang secara matang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Renja Tahun 2026 menjadi sangat penting untuk mengonsolidasikan berbagai agenda pembangunan sosial yang telah dirumuskan dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025–2029**.

Penyusunan Renja Dinsos P3A Tahun 2026 juga dilakukan dengan mempertimbangkan **hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya**, integrasi

program prioritas nasional dan provinsi, serta hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjawab isu-isu strategis yang berkembang.

Lebih jauh, perencanaan ini juga diarahkan untuk mendukung **pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs)** yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P3A, seperti pengentasan kemiskinan (Goal 1), kesetaraan gender (Goal 5), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8), serta pengurangan kesenjangan (Goal 10).

Dengan memperhatikan dinamika permasalahan sosial, arah kebijakan pembangunan, landasan hukum yang berlaku, serta potensi dan kapasitas daerah, maka penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam penguatan kinerja perangkat daerah untuk mewujudkan pelayanan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dan mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Probolinggo yang tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan, tetapi juga sebagai pijakan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan sosial di tahun-tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026 ini disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, RENJA ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender;
 17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
 19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

1.3. MAKSUD TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai dasar dalam penentuan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD;
- b) Menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 ke dalam rencana kerja tahunan;
- c) Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026;
- c) Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, satu Unit Pelaksana Teknis dan tiga Unit Pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2022 sampai dengan 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi *output* yang diharapkan.

Capaian Kinerja tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Reviu hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Tabel di bawah ini mencantumkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Kota Probolinggo dengan pokok-pokok materi yang tersaji antara lain:

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran induk tahun 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebesar Rp.18.292.244.804,00 dengan sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK) Non Fisik, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Realisasi anggaran sampai dengan triwulan empat sebesar Rp15.509.525.884,00.

Sampai dengan triwulan empat terdapat Perubahan APBD yang mengubah pagu menjadi Rp 16.757.878.363,00 dengan tiga sumber dana, yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Fiskal (DIF) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

b) Capaian Program

Pada tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengampu 3 urusan, dengan melaksanakan 12 program, 25 kegiatan, dengan 65 sub kegiatan. Adapun capaian program adalah sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan outcomes persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan sebesar 97,41%;
- 2) Program pemberdayaan sosial dengan outcomes persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial sebesar 97,25%;
- 3) Program rehabilitasi sosial dengan outcomes persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial capaiannya sebesar 94,08%;
- 4) Program perlindungan dan jaminan sosial dengan outcomes persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial capaiannya sebesar 87,46%;
- 5) Program penanganan bencana dengan outcomes persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan bencana terealisasi sebesar 94,25%;
- 6) Program pengelolaan taman makam pahlawan dengan outcomes persentase TMP yang terkelola dengan capaian 98,93%;
- 7) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan outcomes persentase peningkatan peran serta kelompok masyarakat dan perangkat daerah dalam pengarusutamaan gender (PUG) tercapai 98,92%;
- 8) Program perlindungan perempuan dengan outcomes persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dengan capaian 88,17%;
- 9) Program pengelolaan sistem data gender dan anak dengan outcomes persentase data gender dan anak yang terpilah capaiannya sebesar 99,86%;

- 10) Program pemenuhan hak anak dengan outcomes persentase pencapaian indikator kota layak anak capaiannya sebesar 98,46%;
 - 11) Program perlindungan khusus anak dengan outcomes persentase efektivitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak capaiannya 84,80%;
 - 12) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dengan outcomes persentase peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat tercapai 98,21%.
- c) Dibandingkan dengan target sesuai renstra maka capaian yang dicapai memenuhi target pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam melaksanakan visi dan misi walikota sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Untuk lebih jelasnya melihat hasil capaian pelaksanaan tahun 2024 terhadap Renstra Perubahan dapat diuraikan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025
Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2023 s.d 2025)	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) (2023 s.d 2025)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja a Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. 2025	Tingkat Realisasi (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (5+7+9))	11=(kolom 10/9 x 100)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penunjang urusan pemerintah	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A

	DAERAH KABUPATEN / KOTA	daerah yang terselesaikan								
1.06.01.2.01 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100%	5	N/A	N/A
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100%	4	N/A	N/A
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42	36	36	100%	42	N/A	N/A
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700	1103	N/A	N/A	N/A	700	N/A	N/A

1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	3	17	17	100%	4	N/A	N/A
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	0	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	N/A	N/A
1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A
1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100%	4	N/A	N/A

1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	100%	4	N/A	N/A
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	N/A	N/A
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	6	6	6	100%	6	N/A	N/A
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	24	24	100%	24	N/A	N/A
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100%	12	N/A	N/A
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	N/A	5	5	100%	5	N/A	N/A
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	10	10	100%	5	N/A	N/A

1.06.01.2.08 .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4	4	100%	4	N/A	N/A
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	11	N/A	N/A
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	N/A	N/A
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	N/A	N/A
1.06.01.2.09 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100%	1	N/A	N/A

1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	29	26	26	100%	29	N/A	N/A
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	2	30	30	100%	30	N/A	N/A
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	82	82	82	100%	73	N/A	N/A
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	4	4	100%	4	N/A	N/A
1.6.2002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	80	80	80	80	100%	81	N/A	N/A
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80	80	80	80	100%	80	N/A	N/A
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	29	29	29	29	100%	29	N/A	N/A

		Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota								
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	5	5	5	5	100%	5	N/A	N/A
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	13	13	14	14	100%	14	N/A	N/A
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	1	1	100%	1	N/A	N/A
1.6.2004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	85	85	85	85	100%	86	N/A	N/A
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	80	80	80	80	100%	80	N/A	N/A

	Pengemis di Luar Panti Sosial	Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya								
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	146	140	99	99	100%	100	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	28	10	10	100%	20	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	N/A	N/A	50	50	100%	100	N/A	N/A

1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	5	5	100%	50	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A

1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	80	80	80	100%	80	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80	80	300	300	100%	300	N/A	N/A

1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	14	14	100%	17	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A

1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	25	25	100%	25	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	20	20	100%	20	N/A	N/A
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	20	20	100%	20	N/A	N/A

1.6.2005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80	80	30	30	100%	41	N/A	N/A
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	80	80	50	50	100%	50	N/A	N/A
1.06.05.2.02. 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	800	5977	800	1804	226%	800	N/A	N/A
1.06.05.2.02. 0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2330	1691	2200	6503	296%	120	N/A	N/A
1.06.05.2.02. 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	117	117	97	97	100%	116	N/A	N/A
1.6.2006	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	80	80	80	80	100%	81	N/A	N/A
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A

1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	N/A	N/A
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	N/A	N/A
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	80	80	80	80	100%	80	N/A	N/A

1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225	134	130	130	100%	225	N/A	N/A
1.6.2007	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang terkelola	85	81	85	85	100%	85	N/A	N/A
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	90	90	90	90	100%	90	N/A	N/A
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	N/A	N/A
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	70	70	8	8	100%	8	N/A	N/A
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36	36	36	36	100%	36	N/A	N/A
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									

	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	51	51	51	51	100%	51	N/A	N/A
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55	52	55	52	95%	55	N/A	N/A
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE !	2	N/A	N/A
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6	6	6	6	100%	6	N/A	N/A

2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100%	2	N/A	N/A
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23	23	23	23	100%	23	N/A	N/A
2.8.2003	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100%	2	N/A	N/A

2.08.03.2.02 .	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24	24	24	24	100%	24	N/A	N/A
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	25	25	100%	25	N/A	N/A
2.08.03.2.03 .	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	41	41	41	41	100%	41	N/A	N/A

		Mendapat Peningkatan Kapasitas								
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpilah	30	30	30	30	100%	30	N/A	N/A
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30	30	30	30	100%	30	N/A	N/A
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	N/A	N/A
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	80	80	80	80	100%	90	N/A	N/A
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	70	70	70	70	100%	70	N/A	N/A

2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27	27	10	10	100%	10	N/A	N/A
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35	35	2	2	100%	2	N/A	N/A
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	80	80	80	80	100%	80	N/A	N/A
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29	29	29	29	100%	29	N/A	N/A
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia	3	3	3	3	100%	3	N/A	N/A

	Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34	34	1	1	100%	1	N/A	N/A
2.8.2007	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	N/A	N/A	20	35	N/A	20	N/A	N/A
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A

	Daerah Kabupaten Kota									
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43	43	15	15	100%	15	N/A	N/A
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	100	100	100	100%	100	N/A	N/A
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	N/A	N/A	20	20	100%	20	N/A	N/A
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90	90	90	90	100%	90	N/A	N/A

2.13.05.2.01 .	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	90	90	90	90	100%	90	N/A	N/A
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	N/A	N/A	1	1	100%	1	N/A	N/A
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	N/A	4	4	100%	4	N/A	N/A

2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1	1	100%	1	N/A	N/A
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	1	1	100%	1	N/A	N/A

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ruang lingkup strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo tidak terlepas dari Undang - undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman pada pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial.

Untuk urusan Sosial Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan OPD yang merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari:

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025*	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,12%	100%	100%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,83%	100%	100%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%	100%	100%	

		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,67%	100%	100%	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	74,8%	100%	16,29%	100%	100%	

Catatan : Untuk realisasi capaian 2025 (diisi capaian s.d triwulan I 2025)

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN				
	Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2024)	Target Kinerja	
				2026	2027
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	%	46,28	46,44	46,55
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,64	96,91	97,05

PENERAPAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis Pelayanan Dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh Kementerian Sosial dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 pelayanan dasar, yaitu:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
- b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
- d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; Dan

- e) Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial tahun 2024 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1,487,395,214,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,400,115,684,00 (94,13%) dan personil sejumlah 15 orang.

Realisasi Kinerja SPM Bidang Sosial Kota Probolinggo
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)		Kategori Indeks
		Indikator	Target (%)	2023	2024	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	74,80%	100 %	TUNTAS PARIPURNA

Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 yang telah mencapai 100% atau Tuntas Paripurna semua, yaitu:

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti,
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pascabencana bagi korban ben

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2024 adalah:

- a. Keterbatasan akses ke pelayanan sosial: Keterbatasan akses ke pelayanan sosial, seperti kurangnya akses ke pendidikan dan kesehatan, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan SPM;
- b. Keterbatasan sumber daya manusia: Keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya pegawai dan staf yang memiliki kompetensi yang sesuai, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan SPM.
- c. Keterbatasan koordinasi: Keterbatasan koordinasi antara berbagai lembaga dan sektor dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan SPM.
- d. Keterbatasan pengawasan: Keterbatasan pengawasan dan evaluasi dapat membuat sulit untuk memastikan bahwa SPM dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Beberapa solusi yang akan dilakukan terkait permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Melalui program pelatihan dan edukasi, ASN dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilannya dalam mengakses dan menggunakan internet untuk membuka akses yang lebih luas dalam pelayanan sosial serta dengan meningkatkan pendanaan agar kapasitas fasilitas pendidikan dan kesehatan ditingkatkan, sehingga masyarakat memiliki akses ke layanan dengan mudah.
- b. Diadakan pelatihan teknis bagi ASN untuk peningkatan kualitas SDM serta menjaga ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor untuk penanganan permasalahan lebih lanjut;

- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja pelaksana. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kritik dan saran melalui saluran pengaduan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan dan kesulitan khusus dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial melibatkan kebijakan dan program-program untuk membantu mereka melewati situasi sulit. Berikut adalah beberapa isu strategis yang relevan:

- 1) Kemiskinan dan Pengangguran: Banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi risiko kemiskinan dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Program-program yang membantu mereka mengakses pelatihan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, atau memberikan dukungan keuangan dapat membantu mengatasi isu ini.
- 2) Perumahan dan Ketersediaan Rumah: Masalah perumahan seringkali menjadi kendala bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kebijakan perumahan yang terjangkau, program bantuan perumahan, dan upaya untuk mengatasi tunawisma menjadi isu strategis dalam konteks ini.
- 3) Kesehatan Mental dan Fisik: Banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi tantangan dalam hal kesehatan mental dan fisik. Layanan kesehatan mental yang terjangkau dan dukungan kesehatan yang holistik menjadi isu kritis.
- 4) Pendidikan dan Keterampilan: Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial meningkatkan peluang mereka di pasar kerja. Kebijakan pendidikan inklusif dan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka menjadi isu strategis.
- 5) Diskriminasi dan Stigma: Penyandang masalah kesejahteraan sosial sering menghadapi diskriminasi dan stigma sosial yang dapat menghambat integrasi mereka dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi diskriminasi dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu ini menjadi isu strategis penting.
- 6) Keamanan Sosial: Perlindungan sosial dan jaringan keamanan sosial menjadi isu strategis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau situasi krisis. Program bantuan sosial yang efektif dapat membantu menyediakan perlindungan finansial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- 7) Kekerasan dan Keamanan: Penyandang masalah kesejahteraan sosial mungkin rentan terhadap situasi kekerasan atau ketidakamanan. Membangun lingkungan yang aman dan memberikan dukungan bagi mereka yang menghadapi kekerasan adalah isu strategis.
- 8) Partisipasi Masyarakat: Penting untuk memastikan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional menjadi isu strategis.
- 9) Keterlibatan Keluarga dan Jaringan Dukungan: Membangun dan memperkuat jaringan dukungan sosial, termasuk peran keluarga, adalah penting bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program dukungan keluarga dan pemberdayaan komunitas menjadi isu strategis dalam konteks ini.
- 10) Akses Layanan Sosial dan Hukum: Memastikan akses yang mudah dan adil ke layanan sosial, kesehatan, dan hukum adalah isu strategis. Hal ini mencakup upaya untuk menghilangkan hambatan administratif dan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang setara ke layanan tersebut.
- 11) Isu inklusif disabilitas menjadi sorotan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Inklusivitas disabilitas bukan hanya tentang memahami dan mengakui keberagaman kondisi fisik dan mental, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penuh dan setara bagi semua individu, tanpa memandang kondisi disabilitas mereka. Saat kita merenungi perjalanan seseorang yang hidup dengan disabilitas, kita menyadari bahwa inklusivitas bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi suatu prinsip yang mendefinisikan kemanusiaan kita bersama. Ini adalah panggilan untuk menyusun fondasi masyarakat yang memahami, menghargai, dan mendukung perbedaan.

Namun, upaya inklusif tidak hanya berkutat pada aspek fisik dan pendidikan. Masyarakat perlu memberikan dukungan emosional dan sosial yang memadai bagi individu dengan disabilitas. Stigma dan diskriminasi harus dihadapi dan diubah, menciptakan ruang di mana setiap orang merasa diterima tanpa syarat.

Mengatasi isu-isu strategis ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah penduduk semester I tahun 2024 adalah 243.054 dan berdasar data akhir tahun 2024 Jumlah PMKS di kota Probolinggo terdapat 112.880 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi diantaranya: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan.

Perlu dipahami bahwa dalam penanganan PMKS, didapatkan kondisi bahwa tidak semua PMKS dapat menikmati hasil pembangunan dan hidup secara layak, berkualitas serta bermartabat. Masih banyak masyarakat dalam rentang perjalanan kehidupannya mengalami kesulitan, hambatan dan permasalahan yang menghambat keberfungsian sosialnya secara layak, bermartabat dan mampu mengembangkan diri.

Disisi lain, penanganan PMKS belum terlaksana secara optimal dan telah menjadi isu bersama baik permasalahan internal maupun eksternal dari PMKS itu sendiri. Faktor internal yang dirasakan PMKS adalah ketidakberdayaannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pemanfaatan dalam mengakses sistem-sistem sumber yang ada secara normatif. Sedangkan faktor eksternal adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dan belum optimal pemerintah dalam penanganan permasalahan PMKS yang berada di masyarakat. Hal itu dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Rendahnya sinergisitas penyelenggaraan pelayanan sosial baik melalui lembaga pelayanan sosial pemerintah maupun bukan pemerintah/swasta.
- 2) Organisasi/Tim bekerja sendiri sendiri sesuai dengan kewenangan atau bidangnya masing-masing.
- 3) Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang sosial.
- 4) Berdasarkan data BPS per 20 November 2023 jumlah masyarakat miskin Kota Probolinggo mencapai 107.120 jiwa, masyarakat miskin ini ditandai dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak mampu melakukan kegiatan usaha produktif.
- 5) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, di antaranya adalah PSKS dan pekerja-pekerja sosial.

b. Masih Banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Isu-isu yang perlu ditangani dalam konteks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota probolinggo yaitu:

- a. Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Berdasarkan data tahun 2024 terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus Perempuan	Jumlah kasus Anak
2021	28	19
2022	24	22
2023	26	29
2024	22	29
2025	8	10

Sumber data: Dinas Sosial P3A Kota Probolinggo, April 2025

- b. Masih terdapat ketimpangan gender yang terjadi baik di pemerintahan maupun masyarakat dalam pemenuhan indikator 7 prasyarat pengarusutamaan gender (PUG). Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena komitmen tersebut belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain.
3. Kebijakan pelaksanaan urusan masih banyak yang netral gender. Hal ini disebabkan oleh karena perspektif gender belum terintegrasikan pada regulasi
4. keterbatasan SDM PPPA yang sensitif dan responsif gender. Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM PPPA belum didukung dengan sistem training yang memadai, seperti adanya modul yang sesuai dengan kebutuhan spesifik PPPA. Kapasitas PUG yang dibutuhkan SDM diantaranya adalah memahami konsep PUG, serta trampil dalam melakukan analisis gender dan mengimplementasikan PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat kelurahan dan pemanfaat. Masih dibutuhkannya Penyuluh yang mempunyai peran yang strategis dalam fasilitasi masyarakat. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh penyuluh akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.

5. Anggaran responsif gender (ARG) belum menyasar pada indikator kinerja pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja Kota. Bahkan tidak sedikit yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada output, tetapi pada dampak yang dihasilkan untuk merubah kesenjangan gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.
6. Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis gender. Hal ini disebabkan oleh karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti yang sampai kepada tingkat pemanfaat. Belum adanya KKP sudah ada panduan data terpilah dan telah dipedomani sehingga data terpilah sudah ada di masing-masing perangkat daerah. Tetapi data terpilah ini belum terkelola dalam sebuah sistem yang ter-update secara reguler. Selain itu, data juga belum sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan analisis gender.
7. Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender. Hal ini disebabkan oleh karena analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan, sehingga berdasarkan kesenjangan tersebut disusun rencana aksi dan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sehingga persoalan kesenjangan dapat diatasi atau dikurangi. Tetapi jika analisis gender dilakukan diluar siklus atau mengalami keterlambatan, maka sudah melampaui batas waktu pengalokasian anggaran, sehingga manfaatnya kurang dapat dirasakan atau tidak dapat mempengaruhi anggaran.
8. Kebutuhan berbasis gender untuk pelaku perempuan belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan di kelurahan. Hal ini disebabkan oleh karena perempuan belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Ini mengindikasikan bahwa perempuan belum menjadi bagian penting dalam organisasi masyarakat, sehingga kurang memberi kepastian dalam mendapatkan akses terhadap pembangunan. Tidak terlibatnya perempuan dalam pembangunan menyebabkan kebutuhan perempuan tidak muncul sebagai masalah yang harus diselesaikan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

1. Tantangan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi PMKS;
- b. memperkuat peran PMKS dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memungkinkan PMKS dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan;
- e. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- f. Kesadaran dan peran serta keluarga, masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah;
- g. Kelembagakan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

2. Peluang:

- a. Adanya jaringan kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada;
- c. Kebijakan yang responsif dan mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat;
- d. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan tersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial;
- e. Adanya dukungan dari berbagai pihak baik eksternal maupun internal dalam membangun bersama untuk mengatasi permasalahan dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Kota Probolinggo sangat serius dalam upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Melalui Dinas Sosial P3A Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk membantu pengentasan kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan sosial dan Hibah. Ke depannya akan menjajaki untuk menggandeng pihak swasta melalui program CSR.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal P. RKPD tahun 2026
Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Rancangan Awal P. RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan 2026	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan 2026	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				16.195.703.277	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15.196.567.588	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Probolinggo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100	7.108.620.077	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100	6.730.325.400	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	300.690.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	133.900.000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	9.900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	19.050.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	290.790.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	114.850.000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	5.319.019.216	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	4.773.765.084	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	5.175.237.216	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	4.647.483.084	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700	95.196.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000	112.482.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	48.586.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	13.800.000	

c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	1.350.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	2.250.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.350.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2.250.000	
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100	252.420.468	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100	284.040.391	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	18.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	59.088.415	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	234.420.468	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	224.951.976	
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100	301.993.243	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100	420.522.819	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	35.332.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	63.672.819	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	14.068.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	19.000.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	9.026.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	10.500.000	

4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3.120.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	20.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	177.417.143	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	244.200.000	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	48.030.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	60.030.000	
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	100	249.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	100	597.148.906	
1	Pengadaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	60.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	20.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	189.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	81.250.000	
3						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	187.000.000	

4						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	206.898.906	
5						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	102.000.000	
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	100	181.210.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	100	184.590.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	7.870.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	6.100.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11	129.690.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11	132.090.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	19.650.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	24.650.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	21.750.000	
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	502.937.150	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	334.108.200	

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Proboli nggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	31.932.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Proboli nggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42.140.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Proboli nggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	116.140.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Proboli nggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	107.836.000	
3	Pemeliharaan Mebel	Kota Proboli nggo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Proboli nggo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	10.000.000	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Proboli nggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73	66.733.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Proboli nggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	64.442.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Proboli nggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	268.131.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Proboli nggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	109.690.200	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Proboli nggo	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	81	60.708.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Proboli nggo	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial	76	465.660.384	

								Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA	77		
								Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	81		
								Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	77		
								Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat	75,5		

								kualitasnya dalam pelayanan sosial			
a	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80	60.708.800	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80	465.660.384	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	29	7.575.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota			
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	5	45.975.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota			
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	14	1.499.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	1	1.499.800	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	4.160.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	13	4.160.000	

	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten / Kota			Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten / Kota			
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1.499.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			
6						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1	1.499.000	
7						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	66	36.220.000	
8						Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12	422.281.584	
II I	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan	86	1.140.781.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi	80,5	1.366.000.000	

			pelayanan rehabilitasi sosial					kebutuhan dasarnya			
								Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,5		
								Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	81		
								Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70,5		
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85,5		
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang	80	903.225.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang	80	1.052.250.000	

			terpenuhi kebutuhan dasarnya					terpenuhi kebutuhan dasarnya			
1	Penyediaan Permakanan	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	746.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	58	800.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1.450.000	Penyediaan Sandang	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10	4.000.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	37.250.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	48.250.000	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	12.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	35.000.000	

5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100	38.275.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100	33.000.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	7.700.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	15.000.000	
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10	1.500.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	50	40.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	50	10.000.000	

9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	10.050.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	4.000.000	
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	1.500.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	4.000.000	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	1.500.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20.000.000	
12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	5.500.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	10.000.000	
13						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	100	65.000.000	

								Kewenangan Kabupaten/Kota			
1 4						Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10	4.000.000	
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	237.556.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	313.750.000	
1						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	4.000.000	
2						Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5.000.000	

3	Penyediaan Permakanan	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	75	53.250.000	Penyediaan Permakanan	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300	70.000.000	
4	Penyediaan Sandang	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	94.496.000	Penyediaan Sandang	Kota Proboli nggo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100.000.000	
5	Penyediaan Alat Bantu	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300	38.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	36.750.000	
6						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	75	4.000.000	
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Proboli nggo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang	100	7.260.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Proboli nggo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang	75	12.000.000	

			Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17	4.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	10.000.000	
9						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5.000.000	
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	75	4.050.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10	7.500.000	

1 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75	10.500.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	25	15.000.000	
1 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50	10.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	20	15.000.000	
1 3	Pemberian Pelayanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	75	15.500.000	Pemberian Pelayanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	20	17.500.000	
1 4						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan	2	12.000.000	

						Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			
I V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Proboli nggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	41	7.447.874.400	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Proboli nggo	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	81	6.233.872.342	
								Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	7,6		
								Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	3,2		
a						Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Proboli nggo	Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi	50	12.399.550	
1						Fasilitasi Proses Pangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Kota Proboli nggo	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	2	12.399.550	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran	50	7.447.874.400	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	50	6.221.472.792	

			keluarga kewenangan Kabupaten/Kota								
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	800	373.427.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	7000	25.000.000	
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120	6.984.355.400	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	116	90.092.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	189	91.472.792	
4						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3817	6.075.000.000	
5						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan	235	30.000.000	

								Usulan Perbaikan yang dilaksanakan			
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	81	309.062.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Probolinggo	Persentase korban bencana alam, sosial, dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	270.671.670	
								Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	81		
								Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100		
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	80	160.346.880	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	80	159.600.000	
1	Penyediaan Makanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500	55.450.000	Penyediaan Makanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500	50.000.000	

2	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250	8.796.880	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20	15.000.000	
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Probolinggo	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1	8.200.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Probolinggo	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	2.400.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	2.400.000	
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Probolinggo	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	85.500.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Probolinggo	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	98	84.000.000	
5						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Probolinggo	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	8.200.000	
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	Kota Probolinggo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	80	148.715.120	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	Kota Probolinggo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	80	111.071.670	

	Bencana Kabupaten/ Kota		Bencana Kabupaten/ Kota			Bencana Kabupaten/ Kota		Bencana Kabupaten/ Kota			
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225	148.715.120	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34	111.071.670	
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Probolinggo	Persentase TMP yang terkelola	85	128.657.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Probolinggo	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	85,2	130.037.792	
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	90	128.657.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	90	130.037.792	
1	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	8.750.000	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	8.750.000	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	8	30.400.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	30.400.000	
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam	36	89.507.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam	24	90.887.792	

	Nasional Kabupaten/Kota		Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Nasional Kabupaten/Kota		Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.470.923.200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.072.537.534	
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusedutamaan Gender (PUG)	51	293.090.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	32	361.071.584	
								Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusedutamaan Gender	55		
a	Pelembagaan Pengarusedutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55	97.450.000	Pelembagaan Pengarusedutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55	77.952.000	

1						Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	45.102.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	43.710.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	100	53.740.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG			
4						Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	65	32.850.000	

b	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6	195.640.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6	283.119.584	
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	101.550.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23	94.090.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
3						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam	Kota Probolinggo	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yang diadvokasi dan	35	30.200.000	

						Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			
4						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	400	169.689.584	
5						Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	195	83.230.000	
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan	100	352.849.200	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	100	105.648.800	
a	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	100	59.250.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	100	2.000.000	

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	59.250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2						monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	500.000	
3						Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1	500.000	
4						Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1	500.000	
5						Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi	1	500.000	

								pengecahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota			
b	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	283.399.200	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	103.148.800	
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24	116.243.200	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	167.156.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
3						layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10	500.000	

4						layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	15	500.000	
5						layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10	500.000	
6						layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2	500.000	
7						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24	100.648.800	
8						Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24	500.000	

c	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	10.200.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	500.000	
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	41	10.200.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
2						Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2	500.000	
II I						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang beperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan	100	369.382.600	

a						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas	40	369.382.600	
1						Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	4	369.382.600	
I V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Probolinggo	Persentase data gender dan anak yang terpilah	30	5.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Probolinggo	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	41	5.280.000	
a	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Kota Probolinggo	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30	5.500.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Kota Probolinggo	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30	5.280.000	

	di Tingkat Daerah Kabupaten/kota					di Tingkat Daerah Kabupaten/kota					
1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5.500.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
2						Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	5.280.000	
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Probolinggo	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	90	550.400.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Probolinggo	Persentase tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	71,3	200.517.400	
a	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Kota Probolinggo	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	70	117.463.000	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA	70	95.091.400	

1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10	16.225.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	101.238.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
3						Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10	68.942.400	

4						Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7	26.149.000	
b	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	80	432.937.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	80	105.426.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29	31.575.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak	Kota Proboli nggo	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3	352.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak	Kota Proboli nggo	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak			

	Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	49.362.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
4						Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10	40.096.000	
5						pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	4	65.330.000	
V I	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Probolinggo	Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan	100	269.084.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Probolinggo	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan	100	30.637.150	

								layanan komprehensif			
								Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	84,47		
a	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	70.750.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100	1.500.000	
1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	20	70.750.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA			
						koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Probolinggo	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1	500.000	
						Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Kota Probolinggo	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi	1	500.000	

						Kewenangan Kabupaten/Kota		pencegahan KtA tingkatKab/Kota			
						Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	5	500.000	
b	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Proboli nggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	120.134.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Proboli nggo	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100	27.637.150	
1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Proboli nggo	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15	120.134.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Proboli nggo	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			
2						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24	25.137.150	
3						layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Proboli nggo	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	20	500.000	

4						layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2	500.000	
5						layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10	500.000	
6						Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24	500.000	
7						layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20	500.000	
c	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	78.200.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Perentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	100	1.500.000	

								Daerah Kabupaten /Kota			
1	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Kota Probolinggo	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	20	78.200.000	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Kota Probolinggo	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan perlindungan dan penanganan bagi AMPK			
2						Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1	500.000	
3						Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1	500.000	

4						Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	20	500.000	
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kota Probolinggo			1.282.814.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kota Probolinggo			774.280.968	
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kota Probolinggo	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90	1.282.814.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kota Probolinggo	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100	774.280.968	
a	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Kota Probolinggo	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	90	1.282.814.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90	774.280.968	

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	1	34.800.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	1	34.800.000	
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	855.150.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	300.000.000	

3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Proboli nggo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	50.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Proboli nggo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	50.000.000	
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Proboli nggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	342.864.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Proboli nggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	389.480.968	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Probolinggo membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat kota. Usulan-usulan tersebut kami tabung dari pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan kota, selain itu juga terdapat usulan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Probolinggo. Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Program/Kegiatan Tahun 2026	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,5 Persen	
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,5 Persen	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	81 Persen	
			Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70,5 Persen	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85,5Persen	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	158 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Permakanan

			Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Tambahan Gizi bagi anak yatim piatu (Bansos) sejumlah 8 Orang
					Usulan Musrenbang Bantuan sembako bagi Keluarga Miskin (Bansos) sejumlah 150 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Alat Bantu (kursi roda) bagi Lansia sejumlah 4 Orang
					Usulan Musrenbang Bantuan Alat Bantu (kursi roda) bagi Lansia sejumlah 4 Orang
	Rehabiltasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	Usulan Musrenbang Bantuan Sembako bagi Eks Narapidana sejumlah 25 Orang
	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Kursi Roda bagi penyandang disabilitas (Bansos) sejumlah 2 Orang
					Usulan Pokir Bantuan Kursi Roda bagi penyandang disabilitas (Bansos) sejumlah 1 Orang

					Usulan Musrenbang Bantuan Kaki Palsu bagi penyandang disabilitas (Bansos) sejumlah 1 Orang
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	81 Persen	
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	7,6 Persen	
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan	3,2 Persen	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	50 Persen	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan sembako bagi Keluarga Miskin (Bansos) sebanyak 150 orang
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	Usulan Musrenbang Peralatan Usaha Bagi Fakir Miskin (Bansos) sebanyak 18 orang
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Probolinggo	Persentase tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	71,3 Persen	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelebagaan PHA	70 Persen	
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Probolinggo	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	10 lembaga	Usulan Musrenbang, sosialisasi tentang penemuhan hak anak sebanyak 5 kegiatan

	Kewenangan Kabupaten/Kota		Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	85 Persen	
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 lembaga	<i>Usulan Musrenbang sosialisasi tentang Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebanyak 1 kegiatan</i>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pemerintah telah menetapkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJPN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2045 adalah:

“NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 8 Misi yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi;
5. Memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian/penelantaran anak - anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak(interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas - tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk - bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial

Selaras dengan RPJPN, Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagaimana disampaikan dalam Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur yaitu : “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”. Sedangkan Tema Pembangunan Kota Probolinggo tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas Kota yaitu:

1. Pembangunan Karakter Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas;
2. Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
3. Penguatan Harmoni Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Guna Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah;
4. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif;
5. Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan;
6. Penguatan Kapasitas SDM untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Adaptif, Bersih dan Efektif;
7. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terpadu berbasis Harmoni Alam dan Lingkungan Hidup.

Untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan masyarakat, di mana sebagai Perangkat Daerah yang mampu urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, mempunyai peran fungsi untuk melaksanakan fungsi koordinatif dengan perangkat daerah dan masyarakat yang terkait sesuai tema pembangunan dalam rangka mencapai target prioritas ke 2 yaitu Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, dengan arah kebijakan untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Sosial:

Arah Kebijakan: Pemerataan Layanan Sosial Dasar yang Berkualitas dalam pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Arah Kebijakan: Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup Perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengarusutamaan gender dalam Pembangunan.

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah Kebijakan:

- 1). Peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kelembagaan Masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam Pembangunan;
- 2). Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai dukungan Pencapaian SPM serta peningkatan partisipasi masyarakat

Ketiga urusan ini mendukung Misi 2 RPJMD Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan dan Sasaran RPJMD - S.3 Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender. Untuk mencapai target prioritas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo melaksanakannya melalui Program, ... Kegiatan dan Sub Kegiatan.

3.1.1 Telaah Renstra K/L

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengacu pada dua telaah Kementrian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Sedangkan Telaah di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.
 - b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.
- 3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :**
- a. *Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak*
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak;
 - b. *Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak*
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
 - c. *Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak*
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**
- Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.
- Dalam pendekatan telaah kedua kementerian, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengambil

Program kerja dari keduanya untuk diturunkan dan disesuaikan sebagai acuan berikut:

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berdasarkan Program K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	- Masih rendahnya Partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka turut serta berperan melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat - Model pemberdayaan sosial yang masih relatif membutuhkan kreativitas dari penyelenggara pemerintahan serta minimnya usulan model pemberdayaan dari penerima manfaat	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang optimal	Pemberdayaan sosial yang maksimal
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Implikasi ditutupnya beberapa lokalisasi di daerah lain menjadikan munculnya WRSE di kota Probolinggo. Dengan demikian dibutuhkan model dan metode yang tepat untuk	Sarana Prasarana belum memadai	Volunterisme (kesukarelawan) masyarakat dalam penanganan PPKS

		mendukung proses tersebut • Pendataan PMKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan yang tepat. • Koordinasi teknis di tingkat Kecamatan/ Kelurahan dalam rangka pelayanan sosial yang berbasis masyarakat. • Masih ada psikotik yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat dalam kegiatan yang mampu membantu pelayanan sosial bagi psikotik yang masih terpasung		
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	• Perlindungan sosial masih memerlukan pelayanan yang implementif seperti melalui advokasi sosial dan sheltered bagi AMPK maupun KTK. • Penanganan korban bencana masih dalam tahap evakuasi, padahal proses mengembalikan fungsi sosial korban secara berkelanjutan merupakan arah penting untuk itu pelayanan bagi korban bencana masih	Dukungan keterpaduan program antar sektor masih kurang	Partispasi Masyarakat dalam pelayanan PPKS sudah muncul

		membutuhkan model pelayanan terpadu. Model Kampung Siaga Bencana dalam rangka mitigasi bencana lebih ditingkatkan dan masih belum terbentuk di tiap kabupaten/kota yang rawan bencana		
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kebijakan dalam penanganan PPKS belum sinergi secara optimal dengan SKPD lain	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang	Volunterisme (kesukarelawan) masyarakat dalam penanganan PPKS
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kebijakan dalam penanganan PPKS belum sinergi secara optimal dengan SKPD lain	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang	Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal
6.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang	Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Unit pelayanan Perempuan yang membutuhkan Perlindungan perempuan yang Berhadapan dengan hukum masih terbatas	Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai di tingkat internal, kelompok Tribina maupun pada Unit Pelayanan Terpadu	Masih kuatnya nilai-nilai kekerabatan
8.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan hak dan kewajiban dalam keluarga	Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai di tingkat internal,	Sudah terdapat Puspaga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
9.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan	Dukungan keterpaduan program antar sector masih	Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun

		dan ketrampilan	kurang	instansi vertikal
10.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai di tingkat internal, kelompok Tribina maupun pada Unit Pelayanan Terpadu	Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan Anak
11.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Unit pelayanan Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus anak yang Berhadapan dengan hukum masih terbatas	Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran	Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap Kasus Anak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kompetensi aparatur dan masyarakat masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	Bergesernya nilai-nilai kesetiakawanan sosial terutama di perkotaan	Sudah menguatnya nilai kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat dan Kesetaraan Gender.

Berikut Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 – 2030 Pelayanan Perangkat Daerah tercantum pada tabel di bawah ini:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2030

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender		Persentase Penurunan PMKS/PPKS	9,19 %	9,60 %	10,00 %	10,47 %	10,88 %	11,28 %	
		Indeks Pembangunan Gender	96,8	96,98	97,1	97,18	97,32	97,46	
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	90,30 %	90,35 %	90,40 %	90%	91,50 %	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	0,248	0,239	0,23	0,222	0,214	0,207	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,9	72,1	73,3	74,5	75,7	76,9	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	84,39	84,69	84,99	85,29	85,59	85,89	

		Perlindungan Anak							
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Peningkatan ekosistem ekonomi, sosial, tata kelola dan lingkungan yang didorong infrastruktur berkelanjutan yang mendukung Stabilitas Daerah dan mengacu pada satu prioritas, antara lain untuk Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada pada prioritas kedua yaitu “Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terbagi menjadi Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib.

Berikut Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo
Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) Tahun 2026	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100 Persen	6.730.325.400	DAU		100 Persen	8.144.935.264
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 Persen	133.900.000	DAU		100 Persen	153.985.000
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	19.050.000	DAU		5 Dokumen	21.907.500

1.06.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	114.850.000	DAU		4 Laporan	132.077.500
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	4.773.765.084	DAU		100 Persen	5.891.332.902
1.06.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	4.647.483.084	DAU		33 Orang	5.746.108.602
1.06.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	112.482.000	DAU		1000 Dokumen	129.354.300
1.06.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	13.800.000	DAU		1 Laporan	15.870.000
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	2.250.000	DAU		100 Persen	2.587.500
1.06.01.2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.250.000	DAU		1 Laporan	2.587.500
1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	284.040.391	DAU		100 Persen	326.646.449
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	59.088.415	DAU		60 paket	67.951.677

	Kelengkapannya							
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	224.951.976	DAU		12 dokumen	258.694.772
1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	420.522.819	DAU		100 Persen	483.601.241
1.06.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63.672.819	DAU		4 Paket	73.223.741
1.06.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	19.000.000	DAU		4 Paket	21.850.000
1.06.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	DAU		4 Paket	12.075.000
1.06.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.120.000	DAU		12 Dokumen	3.588.000
1.06.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	20.000.000	DAU		6 Laporan	23.000.000
1.06.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	244.200.000	DAU		24 Laporan	280.830.000
1.06.01.2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	60.030.000	DAU		12 Dokumen	69.034.500

1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 Persen	597.148.906	DAU		100 Persen	690.279.242
1.06.01.2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	187.000.000	DAU		1 Unit	215.050.000
1.06.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	20.000.000	DAU		1 Unit	23.000.000
1.06.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	81.250.000	DAU		6 Unit	97.000.000
1.06.01.2.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	206.898.906	DAU		6 Unit	237.929.242
1.06.01.2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	102.000.000	DAU		6 Unit	117.300.000
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100 Persen	184.590.000	DAU		100 Persen	212.278.500

1.06.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.100.000	DAU		4 Laporan	7.015.000
1.06.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	132.090.000	DAU		11 Laporan	151.903.500
1.06.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.650.000	DAU		1 Laporan	28.347.500
1.06.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.750.000	DAU		12 Laporan	25.012.500
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	334.108.200	DAU		100 Persen	384.224.430
1.06.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.140.000	DAU		1 Unit	48.461.000
1.06.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	107.836.000	DAU		24 Unit	124.011.400
1.06.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	DAU		5 Unit	11.500.000

1.06.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	64.442.000	DAU		125 Unit	74.108.300
1.06.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	109.690.200	DAU		5 Unit	126.143.730
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial	76 Persen	465.660.384	DAU		82 Persen	505.082.300
		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA	77 Persen					
		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	81 Persen					
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	77 Persen					

		Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	75,5 Persen					
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	81 Persen	465.660.384	DAU		80 Persen	505.082.300
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1.499.800	DAU		1 Keluarga	7.379.300
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Lembaga	4.160.000	DAU		13 Lembaga	4.200.000
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1 Orang	1.499.000	DAU		1 Orang	1.850.000
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	66 Orang	36.220.000	DAU		66 Orang	41.653.000
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	422.281.584	DAU		12 Laporan	450.000.000
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,5 Persen	1.366.000.000	DAU		87 Persen	1.477.762.500
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	80,5 Persen					

		dasarnya						
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	81 Persen					
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70,5 Persen					
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85,5 Persen					
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	1.052.250.000	DAU		80 Persen	1.116.950.000
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	800.000.000	DAU		100 Orang	840.000.000
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	DAU		100 Orang	5.000.000

1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	48.250.000	DAU		20 Orang	55.000.000
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	35.000.000	DAU		20 Orang	30.000.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	33.000.000	DAU		100 Orang	35.000.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15.000.000	DAU		100 Orang	17.500.000
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000	DAU		50 Orang	12.500.000
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.000.000	DAU		20 Orang	4.000.000
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	DAU		10 Orang	4.600.000

1.06.04.2.01.001 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.000.000	DAU		20 Orang	23.000.000
1.06.04.2.01.001 2	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	DAU		20 Orang	11.000.000
1.06.04.2.01.001 4	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	65.000.000	DAU		100 Orang	74.750.000
1.06.04.2.01.001 7	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	DAU		10 Orang	4.600.000
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	313.750.000	DAU		80 Persen	360.812.500
1.06.04.2.02.000 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	DAU		10 Orang	4.600.000
1.06.04.2.02.000 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	DAU		10 Orang	5.750.000

1.06.04.2.02.000 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	70.000.000	DAU		300 Orang	80.500.000
1.06.04.2.02.000 4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	DAU		100 Orang	115.000.000
1.06.04.2.02.000 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	36.750.000	DAU		4 Orang	42.262.500
1.06.04.2.02.000 6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	4.000.000	DAU		75 Orang	4.600.000
1.06.04.2.02.000 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	12.000.000	DAU		75 Orang	13.800.000
1.06.04.2.02.000 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000	DAU		50 Orang	11.500.000

1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	DAU		10 Orang	5.750.000
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.500.000	DAU		10 Orang	8.625.000
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	15.000.000	DAU		25 Orang	17.250.000
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	DAU		20 Orang	17.250.000
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	17.500.000	DAU		20 Orang	20.125.000
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	12.000.000	DAU		2 Dokumen	13.800.000
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	81 Persen	6.233.872.342			42 Persen	7.155.047.050

		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	7,6 Persen					
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	3,2 Persen					
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi	50 Persen	12.399.550,00				14.317.500,00
1.06.05.2.01.004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	2 Orang	12.399.550,00	DAU		2 Orang	14.317.500,00
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	50 Persen	6.221.472.792	DAU		50 Persen	7.140.729.550
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7000 Orang	25.000.000	DAU		7000 Orang	28.750.000
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	189 Orang	91.472.792	DAU		189 Orang	115.000.000
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3817 Orang	6.075.000.000	DAU, DBHCH T		3817 Orang	6.962.479.550

1.06.05.2.02.000 8	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	235 Usulan	30.000.000	DAU		235 Usulan	34.500.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial, dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 Persen	270.671.670	DAU		82 Persen	311.271.650
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	81 Persen					
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100 Persen					
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	80 Persen	159.600.000	DAU		80 Persen	183.540.000
1.06.06.2.01.000 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000	DAU		500 Orang	57.500.000
1.06.06.2.01.000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	DAU		20 Orang	17.250.000

1.06.06.2.01.000 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	2.400.000	DAU		24 Orang	2.760.000
1.06.06.2.01.000 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	84.000.000	DAU		98 Orang	96.600.000
1.06.06.2.01.000 7	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8.200.000	DAU		10 Orang	9.430.000
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	80 Persen	111.071.670	DAU		80 Persen	127.731.650
1.06.06.2.02.000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	111.071.670	DAU		34 Orang	127.731.650
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	85,2 Persen	130.037.792	DAU		87 Persen	145.022.500
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	90 Persen	130.037.792	DAU		90 Persen	145.022.500
1.06.07.2.01.000 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.750.000	DAU		1 Dokumen	10.062.500

1.06.07.2.01.000 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	30.400.000	DAU		1 Makam	34.960.000
1.06.07.2.01.000 3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24 Laporan	90.887.792	DAU		24 Laporan	100.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	32 Persen	361.071.584	DAU		54 Persen	415.241.322
		2 Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender	55 Persen					
2.08.02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 Persen	77.952.000	DAU		55 Persen	89.653.800

2.08.02.2.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.102.000			2 Dokumen	51.876.300
2.08.02.2.01.001 3	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	65 Lembaga	32.850.000			65 Lembaga	37.777.500
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6 Persen	283.119.584	DAU		6 Persen	325.587.522
2.08.02.2.02.000 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/dunia usaha/media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	35 Lembaga	30.200.000	DAU		35 Lembaga	34.730.000
2.08.02.2.02.000 8	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	400 Orang	169.689.584	DAU		400 Orang	195.143.022
2.08.02.2.02.000 9	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan	195 Orang	83.230.000	DAU		195 Orang	95.714.500

		bimtek atau pelatihan						
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	105.648.800	DAU		100 Persen	121.421.120
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 Persen	2.000.000	DAU		100 Persen	2.225.000
2.08.03.2.01.000 3	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	500.000	DAU		1 laporan	500.000
2.08.03.2.01.000 4	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	575.000
2.08.03.2.01.000 6	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	500.000	DAU		1 Lembaga	575.000

2.08.03.2.01.000 7	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kebijakan	500.000	DAU		1 Kebijaka n	575.000
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	100 Persen	103.148.800	DAU		100 Persen	118.621.120
2.08.03.2.02.000 4	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	500.000	DAU		10 Orang	575.000
2.08.03.2.02.000 5	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	15 Orang	500.000	DAU		15 Orang	575.000
2.08.03.2.02.000 6	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	500.000	DAU		10 Orang	575.000
2.08.03.2.02.000 7	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Orang	500.000	DAU		2 Orang	575.000

2.08.03.2.02.000 8	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	100.648.800	DAU		24 Orang	115.746.120
2.08.03.2.02.000 9	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	500.000	DAU		24 Orang	575.000
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	100 Persen	500.000	DAU		100 Persen	575.000
2.08.03.2.03.000 8	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2 Orang	500.000	DAU		2 Orang	575.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang beperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan	100 Persen	369.382.600			100 Persen	375.000.000
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas	40 Persen	369.382.600			40 Persen	375.000.000

2.08.04.2.02.000 8	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	369.382.600	DAU		4 Lembaga	375.000.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	41 Persen	5.280.000	DAU		42 Persen	6.072.000
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30 Persen	5.280.000	DAU		30 Persen	6.072.000
2.08.05.2.01.000 3	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.280.000	DAU		1 Dokumen	6.072.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	71,3 Persen	200.517.400	DAU		92 Persen	226.311.250
2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelebagaan PHA	70 Persen	95.091.400	DAU		70 Persen	105.071.350

2.08.06.2.01.000 3	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	68.942.400	DAU			75.000.000
2.08.06.2.01.000 5	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	26.149.000	DAU			30.071.350
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	85 Persen	105.426.000	DAU		80 Persen	121.239.900
2.08.06.2.02.000 7	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 Lembaga	40.096.000	DAU		10 Lembaga	46.110.400
2.08.06.2.02.000 9	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	65.330.000	DAU		4 Lembaga	75.129.500

2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	30.637.150	DAU		100 Persen	35.232.722
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	84,47 Persen					
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	70 Persen	1.500.000	DAU		70 Persen	1.725.000
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	575.000
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	500.000	DAU		1 Kegiatan	575.000
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	5 Orang	500.000	DAU		5 Orang	575.000
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100 Persen	27.637.150	DAU		100 Persen	31.782.722

2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	25.137.150	DAU		24 Orang	28.907.722
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	500.000	DAU		20 Orang	575.000
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Orang	500.000	DAU		2 Orang	575.000
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	500.000	DAU		10 Orang	575.000
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	500.000	DAU		24 Orang	575.000
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	500.000	DAU		20 Orang	575.000
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	70 Persen	1.500.000	DAU		70 Persen	1.725.000

2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	500.000	DAU		1 Dokumen	575.000
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	500.000	DAU		1 Lembaga	575.000
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	20 Orang	500.000	DAU		20 Orang	575.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100 Persen	774.280.968	DAU		92 Persen	870.949.065

2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90 Persen	774.280.968	DAU		90 Persen	870.949.065
2.13.05.2.01.000 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	34.800.000	DAU		1 Dokumen	40.020.000
2.13.05.2.01.000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	300.000.000	DAU		2 Lembaga	345.000.000
2.13.05.2.01.000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	57.500.000

2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	389.480.968	DAU		1 Dokumen	428.429.065
-------------------	---	--	-----------	-------------	-----	--	-----------	-------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026 disusun sebagai dokumen operasional tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2026.

Rencana kerja ini memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Perencanaan kegiatan disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), serta memperhatikan sinergitas antar program lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lain maupun dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Dalam penyusunan pendanaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas anggaran, serta memperhatikan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara holistik dan integratif, mengedepankan pendekatan *money follow program*, yaitu pengalokasian anggaran yang difokuskan pada program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.043.386.090,00 secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2026	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) Tahun 2026	Rencana Tahun 2026		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK			17.043.386.090	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			15.196.567.588	
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			15.196.567.588	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100 Persen	6.730.325.400	DAU
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 Persen	133.900.000	DAU
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	19.050.000	DAU
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	114.850.000	DAU
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	4.773.765.084	DAU
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	4.647.483.084	DAU

1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	112.482.000	DAU
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	13.800.000	DAU
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	2.250.000	DAU
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.250.000	DAU
1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	284.040.391	DAU
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	59.088.415	DAU
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	224.951.976	DAU
1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	420.522.819	DAU
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63.672.819	DAU
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	19.000.000	DAU
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	DAU
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.120.000	DAU
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	20.000.000	DAU
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	244.200.000	DAU

1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	60.030.000	DAU
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 Persen	597.148.906	DAU
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	187.000.000	DAU
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	20.000.000	DAU
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	81.250.000	DAU
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	206.898.906	DAU
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	102.000.000	DAU
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100 Persen	184.590.000	DAU
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.100.000	DAU
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	132.090.000	DAU
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.650.000	DAU
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.750.000	DAU
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	334.108.200	DAU
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.140.000	DAU
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	107.836.000	DAU
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	DAU

1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	64.442.000	DAU
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	109.690.200	DAU
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial	76 Persen	465.660.384	DAU
		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA	77 Persen		
		Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	81 Persen		
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	77 Persen		
		Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	75,5 Persen		
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	81 Persen	465.660.384	DAU
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	1.499.800	DAU
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Lembaga	4.160.000	DAU

1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1 Orang	1.499.000	DAU
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	66 Orang	36.220.000	DAU
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	422.281.584	DAU
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,5 Persen	1.366.000.000	DAU
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,5 Persen		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	81 Persen		
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70,5 Persen		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85,5Persen		
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	1.052.250.000	DAU
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Orang	800.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	48.250.000	DAU

1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	35.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	33.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	65.000.000	DAU
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	DAU

1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	313.750.000	DAU
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	70.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	36.750.000	DAU
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	4.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	12.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah	10 Orang	5.000.000	DAU

		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.500.000	DAU
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	15.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	DAU
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	17.500.000	DAU
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	12.000.000	DAU
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	81 Persen	6.233.872.342	
		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	7,6 Persen		
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	3,2 Persen		
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi	50 Persen	12.399.550,00	
1.06.05.2.01.004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	2 Orang	12.399.550,00	DAU

1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	50 Persen	6.221.472.792	DAU
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7000 Orang	25.000.000	DAU
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	189 Orang	91.472.792	DAU
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3817 Orang	6.075.000.000	DAU, DBHCHT
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	235 Usulan	30.000.000	DAU
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial, dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 Persen	270.671.670	DAU
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	81 Persen		
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100 Persen		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	80 Persen	159.600.000	DAU
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000	DAU
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	DAU

1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	2.400.000	DAU
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	84.000.000	DAU
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	8.200.000	DAU
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	80 Persen	111.071.670	DAU
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	111.071.670	DAU
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	85,2 Persen	130.037.792	DAU
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	90 Persen	130.037.792	DAU
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.750.000	DAU
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	30.400.000	DAU
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24 Laporan	90.887.792	DAU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.846.818.502	

2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.072.537.534	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	32 Persen	361.071.584	DAU
		2 Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender	55 Persen		
2.08.02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 Persen	77.952.000	DAU
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.102.000	
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	65 Lembaga	32.850.000	
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6 Persen	283.119.584	DAU
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/dunia usaha/media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	35 Lembaga	30.200.000	DAU

2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	400 Orang	169.689.584	DAU
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	195 Orang	83.230.000	DAU
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	105.648.800	DAU
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 Persen	2.000.000	DAU
2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	500.000	DAU
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000	DAU
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	500.000	DAU
2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kebijakan	500.000	DAU
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	100 Persen	103.148.800	DAU

2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	500.000	DAU
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	15 Orang	500.000	DAU
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	500.000	DAU
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Orang	500.000	DAU
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	100.648.800	DAU
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	500.000	DAU
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	100 Persen	500.000	DAU
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2 Orang	500.000	DAU
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang beperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan	100 Persen	369.382.600	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas	40 Persen	369.382.600	

2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	369.382.600	DAU
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	41 Persen	5.280.000	DAU
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30 Persen	5.280.000	DAU
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.280.000	DAU
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	71,3 Persen	200.517.400	DAU
2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelebagaan PHA	70 Persen	95.091.400	DAU
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	68.942.400	DAU
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	26.149.000	DAU
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	85 Persen	105.426.000	DAU

2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 Lembaga	40.096.000	DAU
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	65.330.000	DAU
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	30.637.150	DAU
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	84,47 Persen		
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	70 Persen	1.500.000	DAU
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	500.000	DAU
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	500.000	DAU
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	5 Orang	500.000	DAU
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100 Persen	27.637.150	DAU
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	25.137.150	DAU
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	500.000	DAU

2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Orang	500.000	DAU
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	500.000	DAU
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	500.000	DAU
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	500.000	DAU
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	70 Persen	1.500.000	DAU
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	500.000	DAU
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	500.000	DAU
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	20 Orang	500.000	DAU
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			774.280.968	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100 Persen	774.280.968	DAU

2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90 Persen	774.280.968	DAU
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	34.800.000	DAU
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	300.000.000	DAU
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	DAU
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	389.480.968	DAU

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara optimal.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja 2026 sangat bergantung pada kerja sama, koordinasi, dan komitmen semua pihak, baik di internal organisasi maupun dengan mitra kerja eksternal. Oleh karena itu, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala akan terus ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Probolinggo, Agustus 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19670711 198809 1 001